PERBANDINGAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI PADA PELAKSANAAN PILPRES PADA TAHUN 2019 & 2024

Dea Hutapea¹, Dora Irene Nababan², Oktavina Sijabat³
deahutapea73@gmail.com¹, dorairenenababan17@gmail.com², oktavina.sijabat@gmail.com³
Universitas Negeri Medan

Abstrak

Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) adalah salah satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia. Perbandingan antara Pilpres tahun 2019 dan 2024 mencakup perubahan signifikan dalam proses pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Metode penulisan menggunakan metode penelitian sejarah dan data akan didapatkan melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, situs web, dan hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dan analisis dalam tulisan ini menunjukkan bahwa perbandingan antara Pilpres tahun 2019 dan 2024 menyoroti evolusi dalam dinamika politik Indonesia, di mana pemanfaatan teknologi dan isu-isu sosial semakin memengaruhi pelaksanaan pemilihan umum. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu terus beradaptasi dan mencari solusi yang inovatif guna memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar dan adil.

Kata Kunci: Pilpres 2019 Dan 2024, Perbandingan, Tantangan.

Abstrak

The Presidential General Election (Pilpres) is one of the key moments in Indonesia's political history. The comparison between the 2019 and 2024 presidential elections includes significant changes in the implementation process, challenges faced, and the impact on society. The writing method uses the historical research method and data will be obtained through literature studies, such as books, scientific journals, websites, and things that are relevant to the problems studied. The results and analysis in this paper show that the comparison between the 2019 and 2024 presidential elections highlights the evolution in Indonesia's political dynamics, where the use of technology and social issues are increasingly influencing the conduct of elections. In the face of these challenges, the government and relevant institutions need to continue to adapt and find innovative solutions to ensure the democratic process runs smoothly and fairly.

Keywords: 2019 and 2024 Presidential Elections, Comparison, Challenges.

PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden (Pilpres) merupakan salah satu momen yang paling penting dalam konteks demokrasi di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, Pilpres 2019 & 2024 diharapkan menjadi pesta demokrasi yang berdampak signifikan bagi arah dan masa depan bangsa. Namun, dengan berkembangnya teknologi informasi dan media sosial, penyebaran informasi hoax atau palsu semakin meningkat, dan hal ini dapat membahayakan proses demokrasi. Pemilihan presiden (Pilpres) juga merupakan ajang pilihan terbesar secara nasional yang melibatkan seluruh rakyat.

Membahas terkait Pemilu, tidak lepas dari suara dan aspirasi, aspirasi masyarakat merupakan bagian dari indikator implementasi penyelenggara pemilihan kekuasaan oleh rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan umum. Masyarakat dan pemilu adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan yang mana masyarakat merupakan faktor utama dan penentu jalan suksesnya pemilu. Aspirasi dari masyarakat terjadi karena adanya pengaruh nilai-nilai yang ada dimasyarakat yang memengaruhi respon politik pada diri seseorang, atau disebut sebagai preferensi politik. Tujuan penelitian ini agar masyarakat mengetahui jika pemilu pada tahun 2019 & 2024 juga banyak sekali berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi pada masa itu

dan berbagai tantangan itu harus dihadapi oleh calon pilpres demi kelangsungan pemilu yang jujur dan adil. Penelitian ini juga mengkaji beberapa perbedaan yang terjadi antara pemilu 2019 & 2024 yang terjadi pada saat itu.

METODOLOGI

Metode yang penulis dalam menyusun tulisan ini metode penelitian sejarah yang didalamnya terdapat teori kausalitas atau sebab akibat. Tahapan pertama sebelum menulis adalah pemilihan topik yang akan dibahas pada penelitian ini. Tahap kedua mengumpulkan sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini, seperti buku dan artikel jurnal yang mendukung. Tahapan ketiga adalah verifikasi, yaitu memilih sumber-sumber yang berkualitas dan cocok dengan judul dan isi dalam penulisan ini. Tahapan keempat ialah penafsiran. Tahapan terakhir adalah menuliskan data berdasarkan sumber yang sudah melalui empat tahapan tersebut yang selanjutnya dituangkan dalam penulisan ini. (Kuntowijoyo 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pilpres Tahun 2019 dan 2024 Di Indonesia

1. Oligarki Media

Dalam bahasa latin “olig” berarti “few” atau sedikit dan “arki” berarti aturan atau sistem kekuasaan, sehingga oligarki dapat disimpulkan sebagai “rule by the few”. Artinya, pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elite kecil masyarakat, ini dibedakan melalui kekayaan, keluarga maupun militer. Hadirnya oligarki dengan sumber daya media tidak hanya mengubah landscape bisnis media, namun juga mengubah landscape orientasi politik media. Hal ini terjadi karena reformasi mengizinkan hadirnya partai politik baru. Terlihat pada oligark media, diantaranya Surya Paloh dan Harry Tanoesoedibjo. Pada tahun 2001 Surya Paloh mendirikan stasiun TV berita 24 Jam pertama, MetroTV, kemudian pada 2011 membentuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sejak didirikan, orientasi politik Metro TV, terutama dalam dukungan Pilpres bergantung pada orientasi Surya Paloh. Setelah sempat bergabung dengan Nasdem dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) akhirnya Hary Tanoesodibjo, pada Februari 2015 mendirikan Partai Perindo, sekaligus meluncurkan INews sebagai siaran televisi berita 24 jam ketiga di Indonesia.

Pada pemilu 2019 dukungan media kepada calon presiden dan wakil presiden semakin tidak berimbang. Pada 7 September 2018, Erick Thohir, pemilik Mahaka Group, jaringan media terbesar di Indonesia terpilih sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional. Artinya, basis dukungan media massa terhadap kemenangan Joko Widodo- Ma’ruf Amin semakin besar. Sebelum Erick Thohir terpilih, Jokowi-Maruf telah mendapatkan dukungan media melalui Hary Tanoesoedibjo pemilik MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Perindo serta, melalui Surya Paloh pemilik Media Group sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem. Sementara tidak ada basis dukungan media massa secara langsung dalam kontestasi pilpres serentak pada kubu Prabowo-Sandi. Ketidakberimbangan dukungan media pada kandidat membuat tidak berimbang pemberitaan antar pasangan kandidat saat Pilpres 2019. Melihat kondisi politik saat ini yang kekuasaan hanya dilakukan oleh segelintir orang. Kondisi ekonomi yang oligopolis ini tidak sehat bagi ekonomi nasional, serta oligarki menggenggam kekuasaan politik di tingkat nasional maupun toal, sehingga kebijakan hanya mengabdikan pada akumulasi dan konsentrasi kekayaan. Maka potensi pemilu di tahun 2024 menjadi ruang politik yang hanya dikuasai oleh politisi pemilik uang, kolega, dan media.

Pemilu 2024, nampaknya hanya menjadi sarana yang akan digunakan oleh Hary Tanoesoedibjo sebagai oligark media untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar daripada 2019. Strategi yang akan digunakan oleh Hary Tanoesoedibjo melalui pendanaan atau sumbangan kemenangan kandidat, menyediakan kantor kemenangan, begitu pula memberikan porsi pemberitaan media untuk menaikkan citra kandidat.

Pada pemilu tahun 2024, para oligarki media (termasuk Hary Tanoesoedibjo) berlombalomba mengucurkan dananya untuk mendanai pasangan potensial yang memiliki kesempatan besar untuk memimpin ditingkat nasional. Berbagai survei saat ini sudah bermunculan mengenai calon-calon kuat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperkuat serta menyelamatkan posisi politik untuk menambah pundi-pundi kekayaan, serta memberikan perlindungan dan keamanan hukum dalam melakukan praktik bisnis. Sehingga, para oligark kerap melibatkan aparat penegak hukum yang pada akhirnya menimbulkan distorsi dalam urusan penegakan hukum atau urusan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Praktik ini akan berdampak terhadap kebijakan-kebijakan politik maupun ekonomi ketika kelompok oligarki ini telah terpilih dan memimpin negara. Sehingga, pemilu 2024 tidak menghasilkan perubahan dari segi politik maupun kesejahteraan bagi Masyarakat.

2. Verifikasi Peserta Pilpres Tahun 2019 dan 2024

Verifikasi Administrasi menurut PKPU Nomor 4 tahun 2022 pasal 27 ayat 2 meliputi verifikasi dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, dugaan keanggotaan ganda Partai Politik, dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Sedangkan Verifikasi Faktual menurut pasal 68 dilakukan terhadap kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/ kota. Dengan adanya perbedaan verifikasi partai Politik peserta pemilu 2019 dan 2024, sehingga penulis meneliti terkait “Perbandingan Verifikasi peserta Pemilu 2019 dan Pemilu 2024”. Tentunya problem yang terjadi pada verifikasi peserta pemilu 2019 masih akan terjadi di pemilu 2024. Untuk itu penulis mencoba membandingkan verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditahun 2019 dan ditahun 2024.

Dalam pemilu 2019, pembuktian kebenaran terhadap keanggotaan partai politik dilakukan dengan verifikasi faktual. Dalam pelaksanaan verifikasi factual terdapat dua kemungkinan hasil yang diperoleh yakni Pertama, data keanggotaan yang didaftarkan tersebut ditolak kebenarannya oleh masyarakat yang terdaftar dengan membuat surat pernyataan keberatan; Kedua, diakui bahwa benar sebagai anggota atau pengurus partai politik disertai surat pernyataan. Namun karena sistemnya hanya sampel dan hanya segelintir jumlah anggota partai yang diverifikasi maka hal tersebut berimplikasi kepada masyarakat dikemudian hari yang Namanya dicatut menjadi anggota partai dan belum diverifikasi kebenarannya.

Dengan adanya verifikasi faktual yang dilakukan kepada seluruh peserta pemilu tahun 2019, kasus-kasus seperti yang dijelaskan di atas dapat diminimalisir dan pemilu 2019 dapat berjalan dengan baik. Berbeda dengan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, verifikasi faktual hanya dilakukan kepada partai non-parlemen. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada tanggal 9 Juni 2022 telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2022, antara lain tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu yang berlangsung sejak tanggal 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022 serta tahapan penetapan peserta Pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022, sesuai amanat Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara (14 Desember 2022). Tidak adanya verifikasi Faktual bagi partai Parlemen peserta pemilu 2024 menjadi perbedaan mendasar di pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2019 semua partai di verifikasi, baik di verifikasi Administrasi maupun Verifikasi Faktual. Sehingga pada pemilu 2024, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki strategi khusus untuk memastikan keabsahan berkas Administrasi yang dimiliki Partai parlemen.

3. Perbandingan Anggaran Kampanye Pilpres Serentak Tahun 2019 & 2024

Pemilu serentak pada tahun 2019 berhasil mengundang partisipasi politik yang sangat

tinggi. Dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi pada pemilu tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 69,5% (Pilpres 2014) menjadi 81,9% (Pilpres 2019). Pemilu Tahun 2019 partai-partai yang mengeluarkan dana kampanye terbesar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dibandingkan partai-partai lainnya. Prediksi dari kemungkinan yang akan terjadi pada Pemilu Serentak 2024 mengenai partisipasi masyarakat berkaitan dengan kenaikan dana kampanye dapat meningkat sebesar 88,6%.

Kampanye sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pemilu, telah menjadi fokus perhatian ketika Pemilu Serentak 2019 berlangsung, yang menurut penulis memiliki kekhasan yaitu waktu kampanye yang panjang sekitar 6 bulantepatnya dimulai dari 23 September 2018 dan berakhir 13 April 2019-, dan tenggelamnya kampanye Caleg oleh kampanye Pilpres. Legislator pada pemilu 2019, yakni artis dan selebritis sekitar Rp 250 juta hingga Rp 1 miliar, para aktivis partai politik sekitar Rp 600 juta hingga Rp 1,2 miliar, purnawiranan TNI sekitar Rp 800 juta hingga Rp 1,8 miliar, serta para pengusaha sekitar Rp 1,8 miliar hingga Rp 6 miliar". Data tersebut menunjukkan bahwa ada ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya yang dimiliki oleh kandidat, sekaligus menunjukan juga besarnya biaya kampanye yang dikeluarkan kandidat. Disinilah pentingnya peran negara untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi semua kandidat, sehingga dapat "memberikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat" Membiayai kampanye secara pribadi menurut disertasi Pramono Anung, bervariasi mulai dari ratusan juta rupiah sampai dengan 20 miliar. Meskipun negara telah memfasilitasi kampanye, politik uang tetap masih mendominasi pelanggaran pemilu serentak 2019.

Politik uang di Indonesia akan tumbuh subur karena didukung oleh budaya masyarakat yang permisif terhadap politik uang. Mayoritas konstituen di Indonesia yang masih memiliki budaya politik parokial dan perilaku demokrasi yang masih kurang dikalangan aktor politik akan sukar untuk menghindari dari praktek politik uang. Disisi lain uang memang memiliki kemampuan untuk mendorong proses demokrasi, tapi uang juga dapat menjadi sumber kecurangan. Rancangan Pendanaan politik dalam Pemilu tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun 2014 dan 2019. Besarnya dana Pemilu Tahun 2024 mencapai Rp 76,6 triliun, dimana sebelumnya pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp 25,59 triliun dan tahun 2014 mencapai sebesar Rp 15,62 Triliun.

Pelaksanaan Pilpres 2019

Pemilu serentak diselenggarakan untuk pertama kalinya pada 2019. Pemilu serentak diartikan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) digelar pada hari yang sama. Dalam empat penyelenggaraan pemilu sebelumnya, pileg dan pilpres dilaksanakan pada waktu terpisah atau pileg mendahului pilpres. Perubahan format pemilu ini salah satunya diarahkan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Format pilpres yang didahului oleh pileg selama ini memunculkan koalisi antar partai politik yang berjangka pendek dan belum mendorong pada upaya penyederhanaan partai politik. Pada praktiknya koalisi yang dibangun partai politik pada skema seperti itu dinilai tidak memperkuat sistem presidensial. Proses dan hasil Pemilu 2019 lalu memperlihatkan bahwa partai besar diuntungkan di dalam pilpres, serta partai lama dan politisi petahana mendapatkan keuntungan pada pileg.

Pada Pilpres 2019 lalu, dengan nilai ambang batas presiden yang tinggi, partai besar menjadi penentu arah koalisi pendukung presiden. Hal ini menguntungkan PDIP, Partai Golkar dan Partai Gerindra yang menjadi tiga besar pemilik kursi di DPR RI 2014- 2019. PDIP dan Partai Golkar yang sudah sejak lama memiliki calon presiden mendapatkan dukungan dari beberapa partai menengah termasuk PKB, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura untuk mencalonkan Jokowi-Maruf Amin; sementara, Partai Gerindra yang mendapatkan dukungan tambahan dari PAN, PKS, dan Partai Demokrat mengusung dua kader Gerindra, Prabowo-Sandiaga. Dapat dikatakan bahwa pada Pilpres 2019 lalu, partai menengah kecil kesulitan untuk menempatkan calonnya dalam pemilu. Pemilu 2019 di Indonesia merupakan proses demokrasi

yang penting dalam menentukan pemimpin negara untuk periode 2019-2024. Proses ini melibatkan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemilu tersebut juga diselenggarakan secara serentak dengan Pemilihan Umum Legislatif 2019.

Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, termasuk masalah teknis persiapan pemilu, partisipasi pemilih, transparansi, tata kelola pemilu yang akuntabel, serta polarisasi sosial. Selain itu, penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan besar, memerlukan upaya untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat sambil tetap memastikan partisipasi yang maksimal.

Tantangan yang Dihadapi pada Pilpres 2019

Sebagai produk politik hasil rumusan antara DPR RI dan Pemerintah, maka tak mengherankan apabila UU Pemilu menjadi sebuah kompromi antara idealisme dan pragmatisme politik pembuatnya. Idealisme akan tujuan pemilu demokratis untuk membentuk Indonesia yang lebih baik menjadi dasar penyusunan UU Pemilu, namun pada beberapa pasalnya hal ini berkompromi dengan kepentingan pragmatis dari pembuat kebijakan, dalam hal ini politisi petahana. Yang menarik, setidaknya ada tiga dari lima isu pokok dalam UU Pemilu yang ditentukan oleh pembuat kebijakan merupakan hasil kompromi yang mengakomodir kepentingan pragmatis, yakni ambang batas presiden, ambang batas parlemen, dan hal terkait dail. Artinya, kepentingan pragmatis politik ini masuk dalam aspek-aspek kepemiluan penting yang diatur oleh UU Pemilu.

Dalam konteks Pilpres 2019, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses pemilihan presiden di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah penyelenggaraan pilpres di tengah pandemi Covid-19. Hal ini menjadi tantangan besar bagi penyelenggara untuk mengajak masyarakat hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara, sambil tetap memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Di tengah tantangan luar biasa dan ketidakpastian yang berasal dari COVID-19, para pembuat keputusan berada di bawah tekanan yang meningkat untuk menentukan bagaimana mengelola dampak langsung pandemi, dan konsekuensi untuk waktu dan tahapan pemilihan. Keputusan ini tidak dapat dianggap enteng, karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan menentukan keadaan demokrasi di negara, negara bagian, atau teritori mereka selama bertahun-tahun yang akan datang.

Pandemi COVID-19 dengan cepat menantang pemilu, menciptakan tuntutan yang baru dan mendesak tentang cara penanganannya. Ancaman kesehatan masyarakat yang utama terkait dengan pemilu muncul dari keharusan pemilih memberikan suara mereka secara langsung di TPS, yang biasanya dalam satu hari. Keharusan berkumpul di TPS dan mengurus perlengkapan pemungutan suara yang telah disentuh oleh banyak orang, sementara terkurung di tempat yang padat di mana menjaga jarak aman dari orang lain mungkin sulit tiba-tiba menjadi tantangan baru.

Selain itu, terdapat juga tantangan teknis persiapan Pilpres, masalah partisipasi pemilih, transparansi, tata kelola pemilu yang akuntabel, dan masa kampanye. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menjalankan proses demokrasi yang berkualitas, serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan pilpres.

Pada sisi lain munculnya persoalan atas sistem presidensial bisa terdeteksi ketika terkombinasi dengan sistem multipartai sebagaimana yang dipraktikkan di Indonesia. Kombinasi keduanya secara teoritis cenderung rumit dan memunculkan potensi relasi eksekutif-legislatif yang kerap bermusuhan. Dalam kombinasi ini presiden yang muncul adalah presiden minoritas, dalam artian basis dukungannya kecil di parlemen meskipun partainya memperoleh suara terbanyak di pemilu. Hal ini terjadi karena banyaknya partai yang ikut pemilu. Sepanjang gelaran pemilu di Indonesia yang menggunakan sistem proporsional dan kombinasi presidensial-multipartai dari 1999 sampai 2014 tidak ada partai yang muncul sebagai kekuatan mayoritas di

parlemen.

Polarisasi sosial juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam konteks Pilpres. Polaritas yang terjadi di suatu negara dapat menimbulkan ancaman eksistensial terhadap sistem politik, seperti yang terjadi di Amerika Serikat pasca-Pilpres 2020. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun kesadaran akan ancaman tersebut untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang muncul. Selain itu, hambatan, ancaman, dan tantangan lainnya juga termasuk dalam proses pemilu, seperti masalah teknis persiapan pemilu, partisipasi pemilih, transparansi, tata kelola pemilu yang akuntabel, serta masalah politik identitas. Semua tantangan ini menunjukkan kompleksitas dalam menjalankan proses pemilu yang berkualitas, serta menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam memastikan kesuksesan pemilu. Dengan demikian, Pilpres 2019 dihadapi oleh sejumlah tantangan yang meliputi aspek teknis, partisipasi pemilih, transparansi, polarisasi sosial, dan politik identitas. Menanggapi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan demokratis.

Pelaksanaan Pilpres 2024

Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi besar yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilu ini juga merupakan ajang pemilihan serentak untuk anggota legislatif, presiden, wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pada tanggal 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil Pemilu 2024 dengan total suara sah nasional sebanyak 164.227.475. Hasil rekapitulasi menunjukkan perolehan suara untuk pasangan Anies-Cak Imin sebanyak 40.971.906 suara, Prabowo-Gibran sebanyak 96.214.691 suara, dan Ganjar-Mahfud sebanyak 27.040.878 suara. Selain itu, perolehan suara partai politik juga diumumkan, dengan PDIP memimpin dengan 25.387.279 suara, diikuti oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, dan partai-partai lain dengan perolehan suara yang bervariasi. Pemilu 2024 menandai titik nadir bagi partai Islam dengan tidak lolosnya PPP ke parlemen.

“Jokowi effect” dan tren elektabilitas Prabowo-Gibran yang belum goyah di Jawa Barat menjadi salah satu indikator kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Meski Prabowo berpotensi memenangkan Pilpres, penentuan cawapres tetap menjadi pertimbangan penting dalam langkah politiknya.

Pemilu 2024 mencerminkan partisipasi pemilih yang tinggi dan dinamika politik yang kompleks. Hasil pemilu menunjukkan dominasi Prabowo-Gibran, sementara prospek demokrasi Indonesia terus menunjukkan perkembangan. Analisis politik menyoroti pentingnya strategi dalam penentuan cawapres dan dampaknya terhadap hasil pemilu. Pemilih muda dan isu dinasti politik juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi arah politik Indonesia ke depan

Tantangan yang Dihadapi pada Pilpres 2024

Mochammad Afifuddin menyampaikan tantangan dalam setiap tahapan pemilu, diantaranya jarak waktu terlalu dekat, kondisi cuaca yang tidak menentu, terjadi irisan tahapan Pemilu dan Pilkada, kompleksitas pengelolaan logistic, akhir masa jabatan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota beririsan dengan tahapan Pemilu yang krusial, dan Afif menyebut ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan. Pada tahapan pematkharan data pemilih misalnya, ada pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP, data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat di dpt pemilih, pemilih yang (MS) tidak terdapat di DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT, ada potensi permasalahan pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, potensi permasalahan dalam tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara. Namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas, dukungan Pemerintah, LSM, dan Media, Kolaborasi, koordinasi, dan sinergi dengan Kepolisian/TNI dan

Lembaga Negara lainnya, Perlu adanya kontrol dan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh agenda Pemilu 2024, serta Peradilan Pemilu berintegritas.

Pasca Pemilu 2024, Indonesia dihadapi oleh sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Beberapa dari tantangan tersebut termasuk polarisasi politik, budaya politik dan politik identitas, transaksi suara dan kecurangan, potensi konflik. "Tantangan pemilu 2024 ini jauh lebih berat daripada pemilu sebelumnya tahun 2019. Datanya saya ambil dari indeks Kerawanan Pemilu ada netralitas, kemudian beban kerja, polarisasi masyarakat, money politic, hingga problem SIREKAP", Umi Illiyana.

Polarisasi politik menjadi salah satu tantangan utama pasca Pemilu 2024. Hal ini dapat mengganggu integrasi bangsa dan memicu praktik politik identitas yang merugikan. Faktor-faktor yang menyebabkan potensi polarisasi politik ini antara lain adalah generasi muda sebagai pemilih dominan, praktik pencemaran nama baik, sentimen agama dan politik identitas, media sosial, netralitas aparatur sipil negara, dan politik identitas.

Budaya politik yang lemah dan berpengaruh terhadap politik identitas juga menjadi pekerjaan rumah dan tantangan utama pasca Pemilu 2024. Yaitu upaya memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan politik tertentu yang berpotensi menghina, menghasut, dan memecah-belah anak bangsa. Variabel ini memerlukan komitmen persatuan dari seluruh pihak untuk mengatasi tantangan ini. "Ini yang tidak boleh, politisasi identitas itu yang tidak boleh, kalau politik identitas itu sudah ada dalam diri kita dan tidak bisa diingkari", Totok Hariyono.

Selain itu, terdapat dugaan transaksi suara yang terjadi secara terang-terangan, bahkan melibatkan kelompok masyarakat. Dugaan kecurangan dan pelanggaran pada Pemilu 2024 juga disebut "lebih parah" daripada pemilu sebelumnya, yang memunculkan tantangan dalam menjalankan demokrasi yang berkualitas. Potensi konflik juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi sejak dini pasca Pemilu 2024. Konflik yang terjadi di sebagian besar daerah dapat sulit ditangani oleh aparat keamanan dan berpengaruh langsung terhadap kondisi kamtibmas dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Praktik politik uang yang cenderung terjadi sebelum dan pada hari pemungutan suara juga menjadi tantangan besar pasca Pemilu 2024. Pelanggaran praktik politik uang ini sulit untuk dibuktikan, sehingga menjadi tantangan dalam pengungkapannya. Seperti pada Pemilu 2019 lalu, praktek-praktek politik uang, kemungkinan masih akan mendominasi di Pemilu 2024. Hal ini didukung sikap masyarakat / pemilih di Indonesia yang cenderung pragmatis. Para politikus utamanya para caleg dan tim suksesnya masih akan melakukan segala cara untuk mendapatkan simpati pemilih. Dimungkinkan segala cara akan mereka lakukan untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Halal atau tidak, melanggar atau tidak, mereka tidak memikirkannya. Terpenting bagaimana caranya agar mereka bisa menang dan terpilih, Bagyo Harsono.

Tantangan Pemilu 2024 selanjutnya, kata Totok, yaitu hoax atau berita bohong. Dia menjelaskan berdasarkan data Mafindo pada 2022, hoax politik mencapai 549 buah dari total 1.698 hoax (32,3 persen). Kemudian, persoalan netralitas ASN, TNI, Polri, penyelenggara pemilu, dan semua pihak yang dilarang ikut dalam kampanye. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat untuk bersama-sama mengawasi soal netralitas ini, juga terhadap penyelenggara pemilu. Tantangan-tantangan pasca Pemilu 2024 ini memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemangku kebijakan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat secara luas untuk mengatasi dan mereduksi dampak negatifnya.

KESIMPULAN

Pemilu Indonesia tahun 2019 dan 2024 merupakan momen penting dalam proses demokrasi negara ini. Namun keduanya menghadapi banyak tantangan kompleks yang harus dikelola secara teliti. Pemilu Indonesia tahun 2019 menandai pertama kalinya pemilu presiden dan parlemen diselenggarakan secara bersamaan. Tujuannya untuk memperkuat sistem presidensial. Namun proses ini juga menghadapi banyak tantangan, termasuk pandemi virus

corona, standar pemilu, jumlah pemilih, transparansi, polarisasi sosial, dan kompleksitas sistem presidensial multipartai. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan kerja sama antara berbagai partai politik untuk menjamin terselenggaranya pemilu demokratis yang berkualitas tinggi. Pemilu 2024 di Indonesia akan didominasi oleh Partai Demokrat yang besar, yang secara bersamaan akan memilih anggota parlemen, presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan wakil kepala daerah.

Meskipun jumlah pemilih tinggi dan dinamika politik yang kompleks, pemilu kali ini diwarnai dengan polarisasi politik, budaya politik dan politik identitas, perdagangan dan kecurangan suara, potensi konflik, politik keuangan, misinformasi, otoritas negara dan penyelenggara pemilu netralitas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama berbagai aktor untuk mengatasi dan memitigasi dampak negatifnya guna menjamin keberlangsungan demokrasi berkualitas tinggi. Perbandingan pemilu presiden tahun 2019 dan 2024 menyoroti dominasi oligarki media, perbedaan verifikasi peserta pemilu, dan peningkatan anggaran pemilu yang signifikan. Hal ini merupakan tantangan serius yang memerlukan reformasi untuk menjamin proses pemilu yang adil dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah putri budiatri dkk, Pemilu serentak 2019: Sistem kepartaian, & penguatan sistem Presidensial “jakarta 2020”
- Afifuddin, Mochammad. “Optimis Hadapi Tantangan Dan Potensi Masalah Pemilu 2024.” Kpu. Go. Id, 15 May 2023.
- Arlen, Intani. (2023). Pemilu Serentak Tahun 2024: Prediksi Partisipasi Politik Masyarakat Mengacu Pada Perbandingan Anggaran Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019. Jakarta: Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.
- Hariyono, Totok. “Bawaslu Beberkan 4 Tantangan Pemilu 2024.” Rmol.Id, 2 Oct. 2023.
- Harsono, Bagyo. “Berita Magelang - Hambatan, Ancaman Dan Tantangan Di Pemilu 2024.” Berita Magelang, 10 May 2023.
- Illiyana, Umi. “Tantangan Dan Catatan Pemilu Serentak 2024: Beban Kerja, Money Politic, Hingga Gentong Babi – Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.” Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik – Universitas Gadjah Mada, 21 Feb. 2024.
- Komisi Pemilihan Umum. “Optimis Hadapi Tantangan Dan Potensi Masalah Pemilu 2024 - KPU.” Indonesiabaik.Id, 20 Mar. 2024.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. “Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024.” Indonesiabaik.Id, 20 Mar. 2024.
- Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. Tiara Wacana. “Managing Elections during the COVID-19 Pandemic: Considerations for Decision-Makers.” International IDEA, Accessed 17 Apr. 2024.
- Permana, Rembulan Randu Dahlia, Panji Anugrah. (2022). Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024. Depok: POLITICOS: Jurnal Politik.
- Scott Mainwaring, Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination, Comparative Political Studies, Vol. 26, No. 2, July 1993, 198-228.
- Tapsell, R. (2017). Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital. Banten: CV Marjin Kiri.
- Wabil Fadli Sultan, Sukri, Ariana Yunus. (2022). Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024. Universitas Hasanuddin: Palita: Journal of Social Religion Research.
- Wahyu, Arya Fernandes, August Mellaz, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Faisal Riza Fritz Edward Siregar, Hurriyah, I Wayan Widyadarna Putra, Lia Wulandari Neil Antariksa, Septiana Dwi Putrianti, Sutarmin Hi Ahmad, Yohan. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Bawaslu.